

ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN HUBUNGANNYA DENGAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2021

Bashrihan *1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia
bashrihan25@gmail.com

Novera Martilova

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia
martilovanovera@gmail.com

Abstract

Inequality between regions is closely related to economic development problems. Where differences in economic capacity between regions and uneven investment realization are the drivers of inequality between regions. This study aims to analyze disparities in economic development and their relationship with investment in West Sumatra Province in 2017-2021. The method used in this study is descriptive quantitative with data collection techniques carried out by means of documentation and the data used is secondary data originating from the BPS of West Sumatra Province and the National Single Window for Investment (NSWI). The results of the Williamson Index show that development inequality in West Sumatra Province in 2017-2021 with an average of 0.280 is classified as low inequality but during this period has increased regularly and consistently. Based on the results of the Pearson correlation test, the relationship between disparity and investment, which is divided into Domestic investment and Foreign Investment, has a very strong relationship with a correlation coefficient of 0.817 with Domestic investment and -0.915 with Foreign Investment.

Keywords: Economic Development, Investment, Disparity

Abstak

Ketimpangan antar wilayah sangat erat hubungannya dengan permasalahan pembangunan ekonomi. Dimana perbedaan kemampuan ekonomi antar wilayah dan realisasi investasi yang tidak merata menjadi pendorong terjadinya ketimpangan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi serta data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari BPS Provinsi Sumatera Barat dan National Single Window for Investment (NSWI). Hasil Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017-2021 dengan rata-rata

¹ Korespondensi Penulis.

sebesar 0,280 yang tergolong kepada ketimpangan rendah namun selama periode tersebut mengalami kenaikan secara berkala dan konsisten. Berdasarkan hasil uji korelasi pearson hubungan disparitas dengan investasi yang terbagi atas PMDN dan PMA memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat dengan koefisien korelasi 0,817 dengan PMDN dan -0,915 dengan PMA.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Investasi, Disparitas

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi negara terkait dengan pembangunan wilayah, pembangunan ekonomi wilayah merupakan serangkaian kerjasama pemangku daerah dengan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada serta membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan regional (Arsyad Lincoln, 1999). Setiap pembangunan daerah secara alami menghasilkan hasil yang bervariasi, karena merupakan hasil dari banyak elemen berbeda yang mempengaruhinya. kesenjangan potensi daerah, partisipasi pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha lokal dan investor), kesenjangan kualitas sumber daya manusia, dan variasi cara pemerintah daerah mengelola perekonomian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembangunan daerah.

Pemanfaatan sumber daya yang ada tidak akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya jika potensi yang dimiliki oleh setiap daerah tidak sejalan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang kurang maksimal. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan daerah. Kesenjangan dalam pertumbuhan regional adalah fitur umum dari kegiatan ekonomi lokal. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh variasi kelimpahan sumber daya alam, susunan demografis masing-masing daerah, dan alokasi dana pembangunan daerah. Selain itu, variasi ini memengaruhi seberapa baik setiap lokasi dapat membantu proses pertumbuhan. Alhasil, tidak aneh jika adanya ketimpangan daerah maju dan daerah dengan perkembangan yang lambat (Sjafrizal, 2008). Bagi pemerintah dan masyarakat, mencapai pertumbuhan yang adil dan merata sangatlah penting. Meningkatnya ketimpangan menghambat kemajuan ekonomi dengan menyebabkan ketidakpuasan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah lainnya.

Ilmu ekonomi Islam mengkaji konsep pembangunan berdasarkan gagasan pembangunan syariah, dimana gagasan tersebut diartikan sebagai sesuatu yang mengkaji dan mempelajari proses pembangunan serta variabel-variabel yang mempengaruhinya, memposisikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan.

Mencapai pembangunan yang sejahtera, kemakmuran, dan pemerataan pertumbuhan suatu daerah merupakan tujuan pembangunan ekonomi syariah.

Ketimpangan ialah bentuk representasi dari salah satu penggambaran berbagai jenis ketidakadilan dalam perekonomian. Menurut ekonomi Islam, mendistribusikan pendapatan secara merata adalah cara terbaik untuk memerangi ketimpangan (Nurul Huda, dkk., 2017). Dalam esensi ekonomi Islam kebijakan distribusi menekankan nilai keadilan berdasarkan konsep distribusi dimana di jelaskan dalam Qur'an surat al-Hasyr ayat 7.

Isu pembangunan ekonomi juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia dan memiliki 10 provinsi dengan karakteristik yang berbeda-beda, termasuk kandungan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, salah satu provinsi di Pulau Sumatera, diawali dengan pengembangan sejumlah potensi daerah. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimilikinya, maka pembangunan tersebut tentunya harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
(Juta Rupiah) Harga Konstan

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat	15598436 4.13	163996189 .04	172205571. 30	169416717. 87	17499606 2.29
Kepulauan Mentawai	2741550.4 0	2875664.0 8	3011724.32	2956007.4 9	3041549.2 3
Pesisir Selatan	8678053.2 4	9139972.3 2	9576664.1 0	9470782.6 8	9790359.5 3
Kab. Solok	8964874. 30	9430224.9 3	9905603. 30	9794967. 67	10119821.8 1
Sijunjung	6135755.7 6	6446992. 48	6757041.4 1	6683021.4 2	6893213.7 1
Tanah Datar	8782098. 09	9224518.5 3	9684473. 44	9575502.2 0	9891019.7 9
Padang Pariaman	12350186. 95	13021887. 79	13334924. 69	11939479. 19	12199848. 45
Agam	13249246. 53	13942516. 42	14608893. 72	14407114. 06	14939508. 57
Lima Puluh Kota	10123647. 61	10653261. 47	11192422.8 8	11062316.7 6	11430547. 76
Pasaman	5614284.6 7	5893340.2 3	6176325.7 6	6122756.21	6330067.3 8

Solok Selatan	3612641.03	3793185.19	3977408.80	3928031.72	4059514.72
Dharmasraya	6843182.09	7204465.92	7560323.31	7454967.68	7709700.35
Pasaman Barat	10384391.53	10925625.62	11411830.76	11259451.50	11682233.99
Padang	39675728.60	42081536.73	44456786.18	43631942.85	45227956.56
Kota Solok	2580783.66	2726707.11	2876461.35	2835750.32	2936827.72
Sawah Lunto	2517150.16	2655619.77	2796536.45	2760924.18	2829590.03
Padang Panjang	2312713.05	2444773.80	2580604.24	2543403.93	2631518.09
Bukittinggi	5483398.44	5812391.14	6152076.98	6045085.08	6263129.76
Payakumbuh	3997854.36	4238662.76	4488210.66	4413983.73	4571926.96
Pariaman	3234234.59	3411294.75	3592021.58	3544659.85	3669629.10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Seri 2010

Berdasarkan Tabel 1.1 menggambarkan bahwa nilai PDRB ADHK di masing-masing kabupaten menunjukkan masih terdapat selisih yang cukup jauh dalam PDRB ADHK kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini ditunjukkan oleh Kota Padang dengan nilai PDRB tertinggi. Di sisi lain, PDRB terendah adalah Kota Padang Panjang. Nilai ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi wilayah belum merata pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Distribusi investasi menjadi indikasi adanya perbedaan pembangunan antar daerah di Sumatera Barat. Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dapat mempercepat pertumbuhan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita. Salah satu faktor penyebab disparitas pembangunan daerah adalah investasi publik dan swasta, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Masalah ini bisa terjadi ketika sebagian besar investasi swasta terfokus secara eksklusif di beberapa daerah, sementara daerah tertentu bahkan tidak diperhatikan oleh investor. Hal ini disebabkan karena Investor asing dan domestik hanya mempertimbangkan lokasi yang menjanjikan sebagai tujuan investasi. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi disisi lain investasi daerah yang tidak merata menyebabkan kelangkaan modal dan mengakibatkan ketimpangan pembangunan.

Tabel 1.2
Realisasi PMDN & PMA Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun
2017-2021

Wilayah	PMDN (Triliun) Rupiah					PMA (Triliun) Rupiah				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat	1.517 9	2.30 7	3.02 6	3.10 4	4.18 4	2.60 4	2.43 2	2.35 7	1.80 8	0.97 7
Kepulauan Mentawai	-	-	0.01 446 4	0.01 5743 3	0.00 689 3	0.05 16	0.31 71	0.00 70	0.00 21	0.01 69
Pesisir Selatan	0.07 32	0.39 01	0.18 37	0.18 41	0.57 06	0.01 03	0.44 91	0.05 41	0.15 68	0.05 83
Solok	0.01 21	0.03 56	0.39 51	0.77 96	0.18 66	0.011 00	0.03 648	0.01 797	0.00 359	0.00 163
Sijunjung	0.08 803	0.05 216	0.10 511	0.02 092	0.03 674	0.00 16	0.00 63	0.41 43	0.04 63	-
Tanah Datar	0.00 0015	0.00 083 8	0.00 0155	0.00 0061	0.00 1728	0.12 54	0.04 54	0.30 72	0.05 13	-
Padang Pariaman	0.17 5	0.24 5	0.25 2	1.187	0.99 6	0.00 95	0.03 71	0.00 24	0.14 34	0.00 18
Agam	0.17 39	0.35 34	0.13 40	0.02 67	0.04 38	0.01 53	0.01 00	0.05 33	0.12 64	0.01 81
Lima Puluh Kota	0.00 75	0.00 81	0.03 67	0.25 48	0.67 02	0.01 991	0.01 378	0.01 063	0.00 094	0.01 033
Pasaman	0.00 92	0.18 38	0.04 03	0.00 11	0.10 89	0.01 545	0.02 713	0.02 151	0.02 126	0.00 371
Solok Selatan	0.07 39	0.51 29	0.01 32	0.08 98	0.30 71	2.23 7	0.69 7	1.07 5	0.19 9	0.13 6
Dharmasraya	0.00 48	0.01 47	0.011 6	0.01 05	0.12 99	0.04 69	0.28 28	0.06 47	0.05 12	0.06 65
Pasaman Barat	0.17 08	0.191 7	0.30 88	0.01 42	0.06 67	-	-	0.04 76	0.30 51	0.10 05
Padang	0.71 3	0.30 2	1.415	0.43	0.88 7	0.05 94	0.50 08	0.27 90	0.70 00	0.55 95
Solok	-	0.00 187	0.00 878	0.00 381	0.02 337	0.00 000	0.00 0001	0.00 222	-	-
Sawahlunto	-	-	0.011 85	-	0.00 266	0.00 085 48	-	-	-	-
Bukittinggi	0.011 45	0.011 35	0.05 500	0.01 550	0.07 632	-	0.00 1176	0.00 1888	0.00 062	0.00 4302

								4	
Padang Panjang	-	-	0.01 3717	-	0.011 284	-	-	-	-
Payakumbuh	0.00 4225	-	0.01 0107	-	0.02 934 6	-	-	-	-
Pariaman	-	-	-	-	0.02 907 9	-	-	-	0.00 008 559

Sumber: NSWI Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dalam periode tersebut serta realisasi PMDN maupun PMA terlihat kurang merata. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat kesenjangan besar antara jumlah investasi menurut kabupaten dan kota. Selain itu, masih ada daerah dan kota tertentu yang realisasi investasinya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pemerataan pembangunan wilayah memang sangat sulit untuk dilakukan, selama ini perbedaan pembangunan antar daerah menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Karena beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sementara yang lain mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, tantangan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang tidak merata tidak dapat diselesaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini. Belum tercapainya pemerataan pembangunan wilayah dalam tingkat perkembangan dan kemajuan yang sama karena ketidakmetaraan dan kurangnya sumber daya salah satunya berupa investasi. Penelitian ketimpangan menjadi penting mengingat ketimpangan merupakan ukuran keberhasilan dalam pembangunan masyarakat. Dalam situasi ini, sangat penting untuk mempelajari perbedaan pembangunan daerah dengan hati-hati sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan bersifat deskriptif dan eksplanatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan penjelasan yang metodis, faktual, dan akurat tentang keadaan sekitar fenomena yang diteliti di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan sebelumnya dari Badan Pusat Statistik (BPS), studi ini dilakukan di 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat. Dokumentasi digunakan sebagai metode utama pengumpulan data untuk penelitian ini. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, majalah, website, dan sumber lainnya. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis Indeks

Williamson (IW) untuk mengkaji disparitas atau ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan teknik analisis korelasi pearson yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan secara linear antara variabel ketimpangan pembangunan ekonomi dengan variabel investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Pembangunan Berdasarkan Indeks Williamson

Dalam mengukur seberapa besar ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021 digunakan analisis indeks williamson dengan PDRB atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan jumlah penduduk sebagai data awal. Nilai indeks yang semakin mendekati angka 0 menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil sedangkan nilai yang mendekati angka 1 menggambarkan ketimpangan yang semakin besar. Kriteria dalam melihat tingkat ketimpangan ialah:

- a. Jika $IW > 0,5$ tingkat ketimpangan tinggi.
- b. Jika $IW = 0,3 - 0,5$ tingkat ketimpangan sedang
- c. Jika $IW < 0,3$ tingkat ketimpangan rendah

Hasil perhitungan Indeks Williamson selama tahun 2017-2021 di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indeks Williamson Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Indeks Williamson (IW)
2017	0,261
2018	0,264
2019	0,267
2020	0,302
2021	0,305
Rata-Rata	0,280

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diperoleh gambaran umum bahwa disparitas atau ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan secara signifikan dan konsisten setiap tahunnya dimana rata-rata ketimpangan pembangunan yang didasarkan atas nilai indeks williamson pada tahun 2017-2021 di Provinsi Sumatera Barat dengan angka 0,280 dengan kategori ketimpangan rendah. Meskipun rata-rata ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat tergolong rendah namun selama rentang tahun 2017-2021 angka ketimpangan terus melebar dalam tahun ke tahun hal ini menggambarkan arah

pembangunan ekonomi yang kurang baik selama kurun waktu 5 tahun tersebut di Provinsi Sumatera Barat.

Hubungan Disparitas dengan Investasi

Analisis korelasi Pearson digunakan untuk menentukan kekuatan hubungan antara investasi dan kesenjangan pembangunan ekonomi. Teknik statistik yang digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya adalah analisis korelasi.

Untuk melihat tingkat hubungan antara ketimpangan pembangunan ekonomi dengan investasi digunakan analisis korelasi pearson. Analisis korelasi adalah metode statistik yang diaplikasikan untuk menetapkan seberapa kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Data yang digunakan dalam analisis korelasi pearson ini ialah data realisasi investasi serta data disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Pedoman derajat hubungan

- Indeks Korelasi Pearson 0,00 s/d 0,20 = tidak ada hubungan
- Indeks Korelasi Pearson 0,21 s/d 0,40 = hubungan lemah
- Indeks Korelasi Pearson 0,41 s/d 0,60 = hubungan sedang
- Indeks Korelasi Pearson 0,61 s/d 0,80 = hubungan kuat
- Indeks Korelasi Pearson 0,81 s/d 1,00 = hubungan sempurna

		Correlations		
		DISPARITA S	PMDN	PMA
DISPARITAS	Pearson Correlation	1	,817	-,915*
	Sig. (2-tailed)		,091	,029
	N	5	5	5
PMDN	Pearson Correlation		,817	1
	Sig. (2-tailed)	,091		,034
	N	5	5	5
PMA	Pearson Correlation	-,915*	-,907*	1
	Sig. (2-tailed)	,029	,034	
	N	5	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Diolah

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)

Berdasarkan tabel correlations pada uji product moment pearson correlation atau koefisien korelasi antara disparitas dan PMDN sebesar 0,817 angka ini

menggambarkan adanya hubungan yang sangat tinggi antara variabel disparitas dengan PMDN. Korelasi yang sempurna ini diasumsikan karena investasi pada sektor industri mineral non logam mendominasi angka investasi PMDN dimana pada sektor industri mineral non logam tersebut banyak menyerap tenaga kerja, sehingga secara tidak langsung menambah pemasukan wilayah dan menstabilkan kas wilayah dalam mengatasi masalah pengangguran yang ada di wilayah tersebut dengan adanya wadah yang menampung angkatan kerja sehingga dana yang disalurkan dalam mengatasi masalah pengangguran dapat diminimalisir. Disisi lain investasi ini menjadi pendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan hal ini disebabkan karena investasi PMDN lebih difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik.

PMA (Penanaman Modal Asing)

Berdasarkan tabel correlations pada uji product moment pearson correlation atau koefisien korelasi antara disparitas pembangunan ekonomi dan PMA sebesar -0,915 angka ini menunjukkan korelasi sempurna antara variabel disparitas dengan PMA. Hal ini diasumsikan karena tidak meratanya distribusi PMA dimana investasi PMA lebih berminat pada daerah-daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang sudah baik serta investasi PMA di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sehingga distribusi PMA hanya tersalurkan kepada daerah-daerah yang memiliki potensi SDA tambang. Akibatnya tingkat ketimpangan semakin melebar karena perbedaan pendapatan perkapita yang didorong oleh distribusi PMA yang hanya melirik daerah tertentu saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson, serta menggunakan Korelasi Pearson maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2017-2021 berdasarkan indeks williamson memiliki nilai rata-rata sebesar 0,280 termasuk kedalam ketimpangan rendah namun dari tahun ketahun mengalami peningkatan secara berkala dan konsisten. Dimana pada tahun 2017 IW sebesar 0,261 terus mengalami peningkatan selama tahun ke tahun hingga pada tahun 2021 IW dengan angka 0,305. Hal ini menggambarkan semakin melebarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017-2021.
2. Hasil dari korelasi pearson menunjukkan bahwa hubungan ketimpangan pembangunan ekonomi dengan investasi yang terbagi atas PMDN dan PMA dimana hubungan disparitas dengan PMDN sebesar 0,817 yang menggambarkan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut sedangkan hasil

indeks korelasi pearson antara ketimpangan pembangunan ekonomi dengan PMA sebesar -0,915 yang berarti memiliki hubungan yang sempurna pada kedua variabel. Maka dapat di deskripsikan bahwa tingkat ketimpangan antarwilayah di Provinsi Sumatera Barat memiliki korelasi yang sangat kuat dengan realisasi investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Naerul Edwin K. 2016. "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No. 2
- Endarwati, Untari dkk. 2017. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa", *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1
- Faniyah, Iyah. 2017. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Padang: Deepublish
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana
- Jhingan, M.L. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kuagow, Yulio Y., dkk. 2022. "Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungan Dengan Investasi di Povinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22, No. 5
- Lincolin, Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Noor, Hendri Faizal. 2013. *Ekonomi Publik*, Padang: Akademia Permata
- Nurhayani, dkk. 2014. "Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Investasi di Povinsi Jambi Tahun 2002-2014", *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 10, No. 2
- Rahardjo, Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi regional teori dan aplikasi*. Padang: Baduose Media
- Sjafrizal. 2014. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Edisi 2. Jakarta: Kencana